

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional dapat terjadi ketika adanya interaksi antar lintas Negara. Pada dasarnya aktor dalam hubungan internasional sendiri ialah Negara-negara, namun demikian seiring dengan perkembangan waktu, Negara bukan lagi menjadi satu-satunya aktor yang terlibat dalam interaksi tersebut. Melainkan juga aktor non Negara juga ikut berperan aktif dalam isu maupun dinamika hubungan internasional. Isu-isu dalam hubungan internasional juga mengalami perubahan dan perkembangan, dari setiap isu yang berkembang juga begitu banyak mengalami transformasi fokus yang berbeda. Karena ketika berbicara akan hubungan internasional dulu lebih banyak kepada isu politik global, perang dan sejenisnya. Akan tetapi terdapat perubahan yang begitu mencolok ketika berbicara akan hubungan internasional hari ini yang lebih banyak berfokus akan hal-hal seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial hingga kebudayaan.

Merujuk sebagaimana fungsinya hubungan internasional juga merupakan kunci utama Negara ataupun dasar-dasar negara sebagai salah satu bagian dari interaksi negara-negara dalam dunia internasional. Karena hubungan internasional sendiri banyak berkembang melalui peperangan, dan dari hal itu terdapatnya pengkajian lanjutan mengenai peperangan itu sendiri yang diseimbangi melalui

perdamaian. Dan beranjak dari berbagai dinamika dan salah satunya mengenai perang dan damai yang kemudian hubungan internasional terus mengalami perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara dengan non-negara, maupun hubungan antara aktor-aktor bukan negara yang mencakup peran dan kegiatan yang dilakukannya. Hal tersebut kemudian banyak dikenal sebagai hubungan internasional kontemporer (Rudy, 2003:51)

Hubungan internasional bersifat kompleks dan interdisipliner, karena didalamnya terdapat berbagai macam bentuk dan karakter dari setiap bangsa yang mempunyai kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan tentunya sedikit rumit dari pada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun inti utama dari hubungan internasional tidak lain untuk mempelajari mengenai perilaku internasional itu sendiri, yang dimana perilaku dari para aktor dan non-aktor. Kebanyakan dari perilaku itu sendiri bisa berbentuk konflik, perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan lain sebagainya. Hubungan internasional juga dapat dilihat dari peranan yang dilakukan oleh negara sebagai aktor utama yang lambat laun akan mengalami pengurangan peran dalam politik dunia mengingat banyaknya dari peranan tersebut mulai digantikan oleh aktor-aktor non-negara. Selain akan hal itu juga mengingat hubungan internasional adalah studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki bermacam-macam pengertian. Dalam bukunya Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani “*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*” mengatakan bahwa:

“Hubungan internasional pada dasarnya ialah disiplin ilmu mengenai interaksi antar negara yang dalam hal ini aktor negara sebagai pelaku utama yang melewati batas-batas lintas antar negara. Dinamika terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat hubungan internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang mencoba menutup diri dalam konteks berhubungan dengan dunia luar” (Perwita & Yani.2005: 3-4).

### **2.1.2 Diplomasi**

Diplomasi merupakan salah satu instrumen yang cukup penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional sebuah negara. Diplomasi sejatinya dipakai dan dijadikan alat utama dalam proses pencapaian kepentingan nasional suatu negara ataupun organisasi internasional. Kadang kala istilah diplomasi disamakan dengan hubungan internasional atau masalah-masalah dunia (*international relations and world affairs*), hubungan-hubungan luar negeri (*foreign relations*), cara melakukan hubungan luar negeri (*conduct of foreign relations*), implementasi politik luar negeri (*implementation of foreign policy*), komunikasi (*officials communications*) dan negosiasi (*negotiation*). Diplomasi sering dipandang sebagai suatu identitas dari hubungan internasional, tetapi perhatiannya lebih ditekankan pada kejadian- kejadian atau penyebab peristiwa, kebijakan, hasil politik dan lain lain sehingga pemahamannya tidak dapat disejajarkan dengan hubungan internasional secara menyeluruh. Jika dianggap diplomasi itu sejajar dari hubungan luar negeri,

hubungan-hubungan itu memiliki dua komponen yaitu kebijakan luar negeri dan tata cara hubungan luar negeri. Diplomasi lebih dekat kepada tatacara hubungan luar negeri (*conduct of foreign policy*) dari pada kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Diplomasi dianggap sebagai implementasi kebijakan luar negeri yang mengandung pengertian bahwa maksud dari diplomasi adalah bukan pada kebijakannya atau pembuat kebijakan tersebut. Diplomasi adalah metode utama yang membuat suatu politik luar negeri dijalankan, suatu cara dan prosedur negara-negara bangsa untuk melakukan urusan politik dan urusan lain mereka pada masa damai (Wijatmadja, 2016: 147).

Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu solusi dalam pengupayaan penyelesaian secara damai. Meskipun demikian, dalam praktiknya diplomasi sering dihadapkan pada kondisi penyelesaian perang dan konflik bersenjata mengingat perubahan dan pemeliharannya dengan cara persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya diplomasi merupakan suatu konsep perpaduan antara ilmu dan seni berunding ataupun untuk menyampaikan pesan melalui perundingan resmi yang digunakan dalam mencapai tujuan dan kepentingan negara yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer dan berbagai jenis kepentingan lainnya yang terdapat dalam bingkai kehidupan hubungan internasional. Dalam mencapai dari puncak diplomasi yaitu tercapainya kepentingan nasional suatu negara, ada berbagai cara yang dapat dilakukan (Watson , 2013:1).

Menurut Kautilya melalui dalam bukunya *Kautilya's concept of diplomacy : a new interpretation* yang mengisyaratkan bahwa tujuan utama diplomasi yaitu pengamanan kepentingan negara itu sendiri. Karena diplomasi merupakan penjamin dari keuntungan yang maksimum untuk negara itu sendiri. Selain hal bersifat ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial lainnya, perlindungan warga negara yang berada dinegara lain, pengembangan budaya dan ideologi serta peningkatan hubungan antar negara menjadi sisi yang cukup penting dalam diplomasi (Bharati, 2008:77). Terdapat cara sebenarnya ketika suatu negara ingin memulai atau melakukan pola hubungan diplomatik negara lain yang sudah terdapat tata cara yang mengaturnya. Adapun tata cara tersebut sudah diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik yang digunakan sebagai acuan mendasar hukum kediplomatikan dan konvensi tersebut sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sendiri menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya tentang hal memperoleh kewarganegaraan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar tugas masing-masing instansi terkait dan berkepentingan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tersebut melalui tugas yang diembannya. Selain perihal mengenai hubungan-hubungan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961, juga terdapat konvensi mengenai hubungan konsuler yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1963. Hukum kekonsulan terbentuk melalui berbagai jaringan perjanjian bilateral antar negara. Perihal tersebut tertuang dalam *Vienna Convention on*

*Consular Relation, 1963* dan mulai berlaku tanggal 19 Maret 1967 setelah diratifikasi oleh sejumlah negara yang hadir.

Meskipun konvensi tersebut telah ada, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian-perjanjian bilateral yang sudah ada tidak berlaku lagi, yang kemudian hal tersebut tidak benar adanya. Keabsahan dipertegas melalui mukadimah konvensi yang berbunyi: “Menegaskan bahwa aturan Hukum Internasional kebiasaan terus mengatur hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh ketentuan Konvensi ini”

Sesuatu yang dibenarkan oleh *Vienna Convention on Consular Relations, 1963* yang diuraikan pada ayat 3 yang berbunyi : “Fungsi konsuler dilakukan oleh pos konsuler. Mereka juga dilaksanakan oleh misi diplomatik sesuai dengan ketentuan konvensi ini”

Ketika suatu negara penerima belum terdapat perwakilan diplomatik, maka kedudukan dan fungsinya dapat digantikan oleh perwakilan konsuler, dan hal sebaliknya juga dapat berlaku. Karena pada dasarnya kedua jabatan tersebut pada hakikatnya sama. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan mendasar dari dua hal tersebut yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Kedua jenis perwakilan, baik itu perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler yang merupakan perwakilan luar negeri dari negara yang sama. Perbedaan mendasar terletak pada tingkat hubungan negara setempat. Jika perwakilan diplomatik hubungannya dengan pemerintah pusat, maka perwakilan diplomatik

hubungannya dengan pemerintah daerah setempat, ditempat perwakilan itu berkedudukan.

b. Umumnya para diplomat dan konsul mempunyai tingkat pendidikan permulaan yang sama seperti yang dipersyaratkan, begitu juga akan hal pendidikan-pendidikan pada tahap selanjutnya (Noor dkk, 2016:136)

Diplomasi hari ini tidak lagi dilakukan secara resmi oleh aktor utama, melainkan juga bisa dilakukan secara tidak resmi melalui lembaga informal atau antar penduduk atau juga melalui komunitas dari berbagai negara yang berbeda. Dan akan hal itu terdapat berbagai jenis diplomasi itu sendiri, yaitu:

- a. Diplomasi Boejuis-Sipil, merupakan bentuk diplomasi yang dalam resolusi permasalahan lebih mengedepankan cara damai melalui praktek negosiasi untuk mencapai tujuan.
- b. Diplomasi demokratis, yang merupakan salah satu diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan lebih berorientasi terhadap suara rakyat.
- c. Diplomasi totaliter, adalah diplomasi yang lebih mengedepankan paa peningkatan peran negara. Pada masanya jenis diplomasi ini marak pada era fasisme Italia, fasisme Spanyol, dan juga pada nazi Jerman.
- d. Diplomasi Provokatif, yang bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.

- e. Diplomasi Preventif, jenis diplomasi ini banyak diluncurkan ketika masyarakat sedang menghadapi suasana genting yang akan memunculkan peristiwa konflik.
- f. Diplomasi perjuangan, diplomasi ini diperlukan saat negara menghadapi situasi sulit dalam mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan dari pihak luar.
- g. Diplomasi Multilajur (*Multitrack Diplomacy*), yang merupakan bentuk diplomasi total yang dilakukan dan dalam penggunaannya mengupayakan seluruh aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.
- h. Diplomasi Publik (*Softpower Diplomacy*), penekanan pada diplomasi ini terletak pada gagasan alternatis penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukannya melalui tindakan provokasi, agitasi dan sinisme (Shoelhi, 2011:7)

#### **2.1.2.1 *Soft – Power Diplomacy***

*Soft Power* merupakan istilah yang mengalami perkembangan seiring dengan berkurangnya kepopuleran mengenai penggunaan hard power yang dimiliki oleh suatu negara dalam mencapai kepentingannya. Melalui *Soft Diplomacy*, negara berusaha memikat dan mempengaruhi negara lain dan masyarakatnya melalui kebudayaan yang dimiliki dan nilai-nilai yang dianutnya melalui cara-cara yang halus dan persuasif. Sehingga, *Soft Power* merujuk kepada penggunaan kekuatan lunak sebagai instrument utama dalam berdiplomasi dibanding pendekatan secara hard

power yang lebih berbasis kapabilitas militer (Rijal, 2017 : 6) Seiring pergeseran dan perluasan dimensi keamanan dari mulai keamanan tradisional ke keamanan nontradisional, yang dimana akhir-akhir ini begitu banyak negara yang lebih mengedepankan diplomasi non-konvensional, yakni melalui elemen-elemen *Soft Power* seperti produk budaya, film, musik, dan yang lainnya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Karena implementasi *Soft Power* tersebut dianggap membutuhkan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan diplomasi konvensional. Menurut Joseph S. Nye, JR tentang *soft power* dalam bukunya *Soft Power: The Means to Success in World Politics* bahwa “*soft power* merupakan kemampuan suatu negara untuk membentuk stigma negara lain agar cenderung mengikuti hal yang diinginkan oleh negara pelaku *soft power* tersebut. (Nye, 2005:5)

Pada praktiknya diplomasi hari ini banyak dilakukan melalui pengedepanan hal *soft power* yang dimiliki oleh suatu negara yakni melalui *soft diplomacy*. Banyak faktor yang menyebabkan penggunaan *soft power* lebih banyak digunakan pada hari ini mengingat akan banyak hal yang terus mengalami perubahan dan perkembangan yang salah satu diantaranya adalah dengan kemajuan teknologi informasi di era percepatan globalisasi (Jemadu, 2008:118). Melalui pendekatan *soft diplomacy*, negara berusaha sebisa mungkin dalam memikat negara lain sepaket dengan masyarakat yang ada didalamnya dengan kebudayaan yang dipunyai serta nilai-nilai yang dianut. Pada kegiatannya, *soft diplomacy* dapat mengarahkan berbagai kedekatan politik menjadi keberlangsungan ekonomi seperti jalan promosi perdagangan dan menolong beban promosi pariwisata. Dan mengingat bahwa cara ini

tidak bisa berjalan dengan sendirinya dan harus ditopang melalui unsur yang lain dalam hal ini *soft diplomacy* memiliki senjata utama dalam pelaksanaannya yaitu melalui penggunaan media dalam suatu waktu yang berlangsung untuk dapat berhubungan dan adanya pola interaksi dalam memberikan informasi melalui cara mendidik ataupun menghibur dengan mencampurkan budaya, nilai dan kebijakan suatu bangsa (Scott, 2009:165-188).

#### **2.1.2.2 *Multi Track Diplomacy***

*Multi track diplomacy* mengacu pada sebuah konsep diplomasi yang menjabarkan tentang proses terjadinya perdamaian dunia dalam sistem internasional melalui kombinasi dari diplomasi dari jalur pemerintah, diplomasi jalur kelompok, dan yang terakhir dari diplomasi jalur individu. Pada dasarnya tujuan dari multi track diplomacy merupakan agar terwujudnya perdamaian dunia melalui pembangunan damai yang terintegrasi antara satu sama lain menggunakan instrumen *soft power*. Penggunaan *soft power* dalam menciptakan perdamaian dunia tercermin dari adanya pelaksanaan *soft diplomacy* yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain di abad ke-21 dengan fokus pada permasalahan dan isu *low politics* yang salah satunya mengenai isu keagamaan ([https://www.beyondintractability.org/essay/multi-track\\_diplomacy](https://www.beyondintractability.org/essay/multi-track_diplomacy)). Multi track diplomacy terkait dengan perdamaian yang merupakan pendekatan sistem dalam memahami sifat internasional *peacebuilding* secara struktural. Yang dimana membuat struktur level menengah yaitu dalam menciptakan struktur sistem perilaku dan tindakan lembaga untuk mendukung perwujudan ataupun juga pelaksanaan perdamaian, dan dengan demikian membangun ekonomi, militer,

dan juga infrastruktur masyarakat yang memberikan kekuatan dan juga hal nyata melalui sistem perdamaian. Mengingat struktur *peacebuilding* dalam *multi track diplomacy* begitu diperlukan. Karena pada dasarnya konflik dan juga permasalahan apapun tidak akan bisa terselesaikan dengan sendirinya dalam mencapai perdamaian, terkecuali diimbangi dengan keterkaitan pembangunan manusianya. Konsep mengenai *multi track diplomacy* terdiri dari beberapa bagian diantaranya terdapat *Track One : Government, Track Two : Nongovernment/Professional, Track Three: Business, Track Four: Private Cittizen, Track Five: Research, Training, and Education, Track Six: Activism, Track Seven: Religion, Track Eight: Funding, Track Nine: Communications and Media* (Aini, 2019:59)

### **2.1.2.3 Diplomasi Publik**

Pada perkembangannya, diplomasi pun terbagi dalam dua jenis yaitu diplomasi tradisional dan diplomasi modern. Tidak bisa dinafikkan lagi bahwasanya segala sesuatu akan terus berjalan mengikuti eranya. Begitu pun dengan diplomasi hari ini yang lebih banyak menggunakan cara-cara diplomasi modern mengingat akan perkembangan akan zaman yang terus berubah. Sehingga melalui hal itu banyaknya bermunculan aktor baru dalam setiap fenomenanya yang pada hari ini tidak lagi berbicara hanya tertuju pada negara saja yang merupakan pelaku utama, melainkan juga sudah masuk dalam ranah yang melibatkan aktor-aktor non negara seperti individu, kelompok, dan organisasi yang baik itu dalam level nasional maupun internasional. Mengingat bahwasanya hari ini negara tidak hanya bersaing kredibilitas

dengan negara lain, tetapi juga dengan media massa, *corporation*, *NGO*, *IGO*, dan berbagai kelompok kepentingan yang ada (Nye, 2004 : 106). Mengenai akan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor yang begitu penting yang berpengaruh pada perkembangan diplomasi yaitu masifnya akan hal yang bersifat revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Percepatan tersebut mengurangi peranan dari diplomat dalam mengumpulkan informasi, dan dalam hal mengambil keputusan beraksi secara cepat terhadap fenomena internasional melalui saluran diplomasi tradisional (Carlsnaess, 2002 : 215-217).

Dalam pengartiannya juga sering kali diplomasi publik diartikan sebagai bentuk sebuah proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan dalam memberikan persepsi atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh negaranya. Diplomasi publik masuk dalam *soft diplomacy* yang dimana diplomasi ini dilakukan untuk membentuk citra positif suatu negara di mata publik global dengan memikat warga negara lain untuk membuat negaranya semakin dikenal. Mark Leonard memberikan gambaran bahwasanya di dalam diplomasi publik terdapat sebuah keterkaitan *image* dan *issue*. Setiap negara mempunyai isu-isu tersebut dapat mempengaruhi pada hubungan suatu negara dengan lingkungan domestic maupun lingkungan internasional (Leonard. 2002 : 8). Mark Leonard juga menilai bahwa terdapat empat tujuan yang dapat diraih dengan adanya diplomasi publik. Pertama, meningkatkan rasa kebersamaan dengan negara lain, dengan cara membuat negara lain memikirkan negara lain, memiliki citra yang baik terhadap suatu negara. Selain

hal itu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap negara tertentu, seperti memiliki paradigma positif. Dan pada tahap akhir yaitu proses mengeratkan hubungan dengan masyarakat di suatu negara serta mempengaruhi masyarakat di negara lain untuk hal-hal yang seperti investasi, dan menjadi kolega dalam hubungan politik (Leonard, 2002 : 9).

Diplomasi publik memiliki ciri identik sebagai kelompok yang bukan pemerintah, bentuknya informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan. Selain itu juga menghilangkan kepanikan akan ketakutan dan meningkatkan saling keterkaitan diantara para pihak yang bersangkutan. Meskipun diplomasi tradisional banyak dianggap kurang berhasil, diplomasi publik tidak lantas menggantikan diplomasi jalur utama tersebut, melainkan masuk dalam ranah melengkapi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional. Idealnya, diplomasi publik haruslah membuka jalan bagi negosiasi yang dikerjakan antar pemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi yang penting, dan memberikan gambaran yang berbeda dari setiap permasalahan yang ada. Sehingga diperlukannya kolaborasi antara aktor negara dan non-negara yang dalam prakteknya sering disebut sebagai diplomasi multijalur atau *Multi-track Diplomacy*. Pada dasarnya ialah sebuah kerangka kerja konseptual dalam melihat proses perwujudan perdamaian internasional sebagai sebuah sistem kehidupan yang idel. Mengenai konsepnya juga merupakan bagian lain dari paradigma *Track One (Government)* dan *Track Two (Non Government)* yang telah membentuk kajian dari bidang ini dalam beberapa dekade terakhir (Leonard, 2002 : 12).

### **2.1.3 Islam dan Hubungan Internasional**

Studi Hubungan Internasional merupakan suatu studi yang memberikan peluang kehadiran agama dalam studinya. Melalui pendekatan pluralisme yang disinggung Lapid dalam *The Third Debate*, membuka ketertutupan kajian-kajian tentang hubungan internasional sehingga memungkinkan kajian-kajian agama dibahas dalam kajian hubungan internasional. Dari berbagai pandangan dunia dalam studi hubungan internasional. Salah satu yang dikembangkan adalah latar belakang keyakinan, khususnya agama yang ada di dalamnya. Agama menjadi faktor penting dalam pembentukan sistem internasional modern. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa peristiwa 11 September 2001 memberikan tanda 'kebangkitan agama dalam urusan internasional. Dengan kata lain, klaimnya adalah bahwa 'pentingnya keyakinan, praktik, dan wacana agama dalam kehidupan pribadi dan publik' dan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi hubungan internasional. Kepedulian budaya dan agama internasional yang serius diperlukan terkait dengan isu terorisme (Mulyana, 2018:1). Jika dilihat di permukaan saja, kontestasi paradigmatik dalam Ilmu Hubungan Internasional dewasa ini ternyata masih tetap didominasi oleh perspektif-perspektif Barat. Idealisme atau liberalisme klasik adalah perspektif dominan yang muncul bersamaan dengan kelahiran Ilmu Hubungan Internasional pada akhir Perang Dunia Pertama. Idealisme kemudian mendapatkan tantangan dari realisme. Realisme sendiri lantas berdebat seru dengan neo-realisme. Dari kawasan Britania Raya, *English school* muncul sebagai tradisi berpikir baru yang mencoba keluar dari perdebatan klasik antara idealisme versus realisme sembari memfokuskan analisa

pada perilaku masyarakat internasional secara kolektif. Sementara itu, neo-liberalisme hadir dan mampu menjelaskan fenomena internasional massif di pertengahan abad kedupuluh, yakni globalisasi dan regionalisme. Namun neo-liberalisme berjuang dengan sangat keras untuk menghadapi kritik dari *marxisme*. Perdebatan bahkan berlangsung lebih seru dengan kehadiran tradisi *post-positivis* yang mampu menjungkir-balikkan asumsiasumsi filosofis perspektif-perspektif sebelumnya yang sangat positivis. Lahirlah teori-teori kritis, feminisme, *green politics*, hingga perspektif post-modernisme yang berakar dari tradisi ontologis skeptisisme. Ada pula perspektif konstruktivisme yang mencoba mendamaikan perdebatan antara positivisme dengan post-positivisme dan berdiri di antara keduanya. Perlu dicatat di sini, bahwa seluruh perspektif yang saling berhadapan dan berkontestasi tersebut lahir dari pengalaman empiris dan cara pandang masyarakat Barat. Sementara itu perspektif Islam yang mulai marak diperbincangkan di akhir abad kedupuluh, berada di luar perspektif-perspektif Barat yang menjadi mainstream dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional kontemporer tadi. Perspektif Islam berasal dari cara pandang (*worldview*) ajaran Islam yang khas dan berbeda dari cara pandang Barat. Dalam kajian ontologis, perspektif Islam meyakini bahwa realitas dapat berwujud fisik dan metafisik. Sementara perspektif-perspektif Barat terbangun dari tradisi rasionalisme-empirisisme yang sekali-kali tidak akan meyakini realitas metafisik sebagai basis argumentasi keilmuan mereka (Arif, 2016:196)

Dalam konteks hubungan internasional misalnya, Islam meyakini bahwa musuh abadi bagi seluruh bangsa dan peradaban ummat manusia di dunia ini adalah iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia (Al-Qur'an, 7: 22, 114:1-6). Pasukan kaum Muslimin yang berperang di atas jalan kebenaran, bahkan diyakini akan dibantu oleh para malaikat yang langsung turun dari langit (Al-Qur'an, 3:124). Iblis, jin, malaikat dan bahkan Allah Subhanahu Wata'ala adalah realitas metafisik yang diyakini eksistensinya dalam perspektif Islam. Namun bagi perspektif Barat, bahasan metafisik semacam itu sudah sejak lama diceraikan pengkajiannya dari dunia akademik mereka. Proyek sekularisasi di dunia pendidikan Barat yang sudah terjadi sejak abad pertengahan-masa *Renaissance*, telah menghasilkan ilmu pengetahuan dengan corak ontologis yang bertumpu pada rasionalisme dan empirisisme semata. Dari sisi epistemologis, perspektif Islam meyakini bahwa wahyu merupakan sumber ilmu pengetahuan yang sangat penting. Pengakuan terhadap otoritas wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan mendapatkan posisi sentral dan menjadi kunci pembeda antara perspektif Islam dengan perspektif Barat. Namun demikian, bukan berarti perspektif Islam menafikan sumber-sumber ilmu pengetahuan lainnya.

Perspektif Islam mendapatkan pengetahuan dari sumber-sumber Al-Qur'an, Hadits, akal (*'aql*) dan kalbu (*qalb*), serta indera (Kania, 2013:92-109). Perspektif Islam menggabungkan antara epistemologi rasionalis-empiris dengan epistemologi berbasis wahyu yang langsung diturunkan Allah melalui para nabi dan rasul-Nya. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam terdiri dari dua macam: ilmu pengetahuan

yang diperoleh melalui wahyu (*revealed knowledge*) serta ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian berbasis rasioempiris (*acquired knowledge*). Ilmu Hubungan Internasional dalam perspektif Islam tentu dijalankan dengan menggunakan metodologi berbasis epistemologi ilmu pengetahuan Islam. Analisa ilmiah dalam perspektif Islam senantiasa dilakukan berdasarkan argumentasi wahyu (*dalil syar'i*) dan argumentasi rasio-empiris (*dalil 'aqli*). Dengan perspektif Islam, teori-teori yang didapatkan bukan hanya akan lebih komprehensif dan berkualitas, namun dalam beberapa hal teori-teori tersebut bahkan mampu mencapai derajat kebenaran mutlak atau aksiomatis yang tidak akan bisa disangkal oleh siapapun ((Arif, 2016:198)

Jika ilmu pengetahuan tersebut diperoleh dari wahyu yang bersifat pasti (*qath'i tsubut qath'i dalalah*) maka kebenaran yang didapatkan akan pula bersifat pasti, misalnya aksioma mengenai setiap manusia yang pasti akan mengalami kematian (Al-Qur'an, 4:78), adanya usia bagi suatu bangsa atau generasi (AlQur'an, 6:6), kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia (Al-Qur'an, 30:1-4), hingga masa depan dunia yang akan mengalami kehancuran atau kiamat (AlQur'an, 16:1, 18:21). Kebenaran-kebenaran yang bersifat pasti merupakan derajat keilmiahian tertinggi yang didamba oleh setiap disiplin ilmu pengetahuan. Dengan demikian, aplikasi perspektif Islam dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional akan meningkatkan kualitas atau derajat keilmiahian Ilmu Hubungan Internasional itu sendiri. Dalam kajian aksiologis, perspektif Barat pada umumnya memahami ilmu

pengetahuan sebagai sesuatu yang bebas nilai (*value neutral*), yakni tidak ada hubungannya sama sekali dengan nilai kemanusiaan dan peradaban yang menghasilkannya. Kebenaran ilmu pengetahuan bersifat obyektif dan berlaku universal. Perspektif yang demikian biasa disebut sebagai positivisme. Namun, pada abad kedupuluh lahirlah gagasan mengenai sosiologi ilmu (*sociology of knowledge*). Gagasan yang kemudian dikenal sebagai post-positivisme ini dibawa oleh tokoh-tokoh seperti Max Scheler, Karl Mannheim, Thomas Kuhn dan Paul Feyerabend. Mereka meyakini bahwa sifat ilmu pengetahuan adalah nisbi atau relatif, bukan universal. Kebenaran ilmiah di suatu waktu dan tempat, tidak lantas menjadi benar di waktu dan tempat yang lain (Daud, 2007:67). Kajian Ilmu Hubungan Internasional berdasar perspektif Islam sebenarnya telah dilakukan oleh pembawa risalah Islam sendiri, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Sebagai seorang manusia biasa (Al-Qur’an, 18:110, 6:50), Nabi pernah beberapa kali melakukan analisa terkait peristiwa-peristiwa hubungan internasional yang terjadi pada masa beliau demi kemaslahatan kaum Muslimin. Berdasar wahyu yang turun kepada beliau, Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hijrah (eksodus) ke negeri Habasyah (Ethiopia). Perspektif Islam dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional memiliki metodologi yang khas dengan senantiasa menggabungkan argumentasi wahyu (*dalil syar’i/ revealed knowledge*) dan argumentasi rasio-empiris (*dalil ‘aqli/ acquired knowledge*). Metodologi yang demikian sangat anggun diaplikasikan dalam kajian yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun pada abad pertengahan. Salah satu hasil kajiannya yang sangat fenomenal

adalah teori mengenai 'ashabiyyah atau solidaritas kelompok. Ibnu Khaldun melakukan teorisasi dengan mengintegrasikan argumentasi rasioempiris dan dalil-dalil wahyu (Daud, 2007:70).

#### **2.1.4 Islamophobia**

Pada dasarnya secara etimologis Islamophobia dari kata Islam & Phobia. Yang dimana merujuk pada rasa takut yang tidak memiliki refrensi, tidak masuk akal atas sebuah objek, tingkah laku, atau pada peristiwa tertentu yang memotivasi individu untuk menghindari atau takut pada situasi tersebut. Kesimpulan yang mendasar mengenai Islamophobia diartikan sebagai bentuk ketakutan yang tidak beralasan yang kongkrit terhadap agama Islam yang dimana terdapat nuansa yang ingin menghilangkan sisi Islami. Sisi lain merujuk pada setiap ide, gagasan, dan segala bentuk aktivitas dimana kalangan Muslim diabaikan dari posisinya dan hak asasi manusia yang kemungkinan dari sebagian masyarakat yang disebabkan kepercayaan Islam. Segala aktivitas warga Muslim dan bentuk sikap terhadapnya baik secara lahir dan batin akan terus dianggap dan dominan cerminan akan perilaku umat Islam secara keseluruhan dan pada dasarnya tidak adanya rasa kepercayaan yang disebabkan oleh tindakan oknum atau yang disebabkan perorangan.

Salah satu peristiwa 11 September 2001, situasi kehidupan warga Muslim Amerika menjadi serba salah terlebih warga Muslim dunia pada umumnya. Diskriminasi dan sikap intoleran menjadi hal yang sering dialami oleh warga Muslim. Islamophobia muncul diakibatkan oleh fenomena baru yang membutuhkan

penamaan. Prasangka akan stigma anti Muslim berkembang begitu cepat pada beberapa tahun terakhir sehingga membutuhkan kosa kata yang baru dalam mengidentifikasinya. Pengistilaan baru akan Islamophobia tidak akan menimbulkan konflik akan tetapi dipercaya akan lebih menonjolkan peranan dalam usaha untuk mengoreksi pandangan dan membangun hubungan yang sedikit lebih baik (*Young European Muslim*). Hal yang tidak bisa dipisahkan dari Islamophobia tidak lain tidak bukan prasangka akan kewaspadaan terhadap orang Muslim dan orang yang dipersepsikan sebagai Muslim. Prasangka tersebut banyak didasarkan pada sebuah klaim terkait bahwasanya Islam merupakan agama “*Inferior*” dan merupakan sebuah bentuk ancaman akan nilai-nilai yang dominan pada sebuah masyarakat (Hady, 2004:8).

Pada umumnya mengenai karakteristik, Islamophobia sendiri memiliki beberapa karakteristik. Dalam memahami bentuk karakteristik tersebut dalam sebuah laporan yang menjelaskan sebuah kunci dalam memahami perbedaan tersebut, yaitu bentuk pandangan yang terbuka dan pandangan yang tertutup terhadap Islam. Bentuk phobia terhadap Islam merupakan gambaran dan karakteristik dari bentuk pandangan yang tertutup terhadap Islam (*closed views*), sementara ketidaksetujuan yang logis dan kritis dan apresiasi hingga penghormatan merupakan bentuk lain dari pandangan terbuka terhadap Islam (*open views*). Akan banyak memunculkan pertanyaan sebenarnya mengapa orang benci dan takut pada komunitas Islam? Sebuah jawaban sederhana yang menjawab mengapa adanya rasa benci dan takut terhadap pihak lain

yaitu adanya bentuk perasaan yang kalah dan tidak mengetahui akan bagaimana cara untuk menang.

Prasangka sosial akan timbul ketika seseorang bersikap dan berperilaku negatif terhadap seseorang. Terhadap beberapa istilah yang terkait akan prasangka adalah diskriminasi, etnosentrisme, *in-group favouritism*, *in-group bias*, *out-group derogation*, *social distance*, dan perihal stereotip. Pengkajian dari beberapa pendekatan tersebut bisa melalui pendekatan individual, kognitif, antar kelompok maupun sosial-kultural. Kembali akan sedikit sejarah di masa lalu, gambaran akan Islamophobia hari ini sudah terlihat ketika Nabi Muhammad datang untuk pertama kali membawa Islam dikalangan orang-orang Quraisy di kota Mekah. Yang dimana orang-orang Quraisy mengkhawatirkan akan datangnya suatu kekuatan baru yang berkuasa, sehingga terdapatnya penentangan dan proses menghalangi penyebaran agama Islam. Dalam fenomenanya hampir sama dengan Islamophobia ketika terjadinya ketakutan bahwa Islam akan menjadi bentuk kekuatan baru yang akan menggantikan nilai lama dalam masyarakat khususnya dalam konteks global secara keseluruhan. Wujud dari kedatangan Islam adalah bentuk misi menyempurnakan pendekatan etik melalui penegakan hukum atau aturan, yang dimana peruntukkan untuk melindungi hubungan antar manusia agar tidak terjadinya ketidakadilan (Hady, 2004:15).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

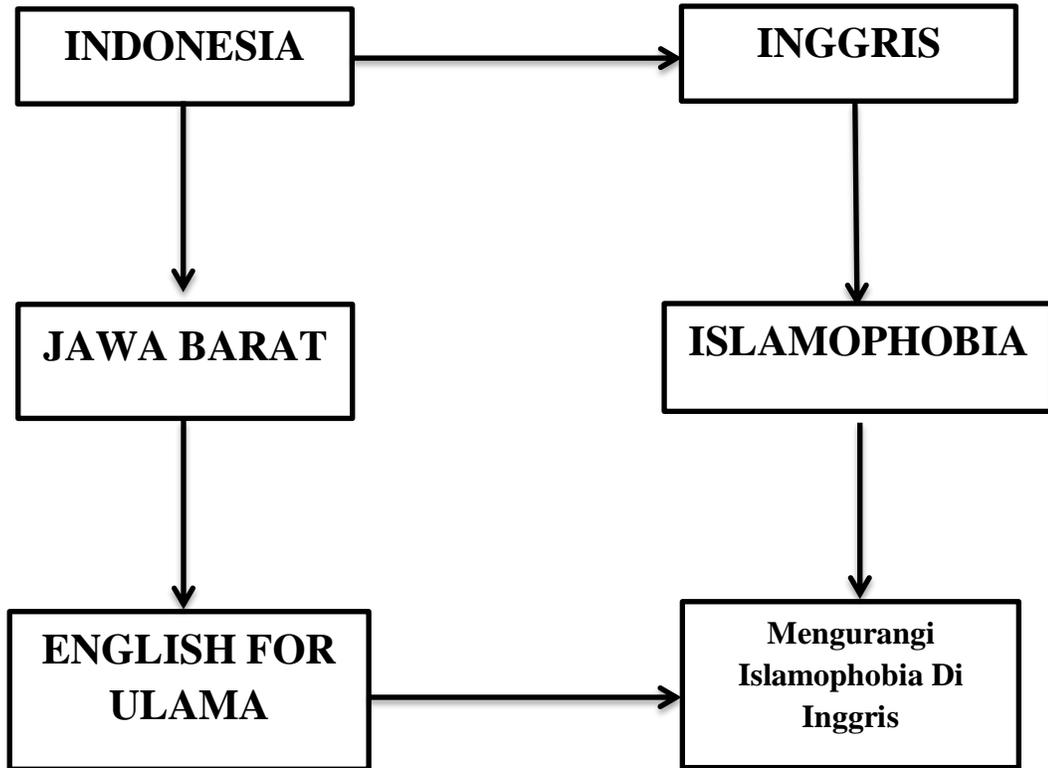
Pada dasarnya hubungan internasional dapat terjadi apabila terdapatnya interaksi yang dilakukan antar lintas negara. Dalam menjalankan aktivitas interaksi

tersebut pada umumnya dilakukan oleh aktor-aktor negara. Namun seiring berkembangnya zaman, hubungan yang terjadi dalam pola aktivitasnya tidak lagi melibatkan aktor utama yang dalam hal ini negara, melainkan juga sudah melibatkan aktor-aktor baru yang sering dikatakan sebagai aktor non negara.

Selain dari perkembangan dari aktor yang terlibat, isu-isu internasional hari ini juga mengalami perubahan arah fokus yang tidak lagi berbicara pada isu politik melainkan mengarah pada isu-isu seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial maupun budaya. Penggunaan cara yang dilakukan juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hubungan internasional dulu lebih mengedepankan segala hal yang bersifat *hard power*, berbeda dengan hubungan internasional hari ini yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat secara lunak dalam pola pendekatannya. Penggunaan yang tepat dalam melakukan pendekatan yang secara lunak melalui cara diplomasi. Dewasa ini, diplomasi dianggap sebagai bagian yang penting dalam hubungan internasional karena dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Diplomasi sering dipandang sebagai suatu identitas dari hubungan internasional, tetapi perhatiannya lebih ditekankan pada kejadian-kejadian atau penyebab peristiwa, kebijakan, hasil politik dan lain lain sehingga pemahamannya tidak dapat disejajarkan dengan hubungan internasional secara menyeluruh. Jika dianggap diplomasi itu sejajar dari hubungan luar negeri, hubungan-hubungan itu memiliki dua komponen yaitu kebijakan luar negeri dan tata cara hubungan luar negeri. Ilmu Hubungan Internasional dewasa ini ternyata masih

tetap didominasi oleh perspektif-perspektif Barat. Sementara itu perspektif Islam yang mulai marak diperbincangkan di akhir abad ke-20, berada di luar perspektif-perspektif Barat yang menjadi mainstream dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional kontemporer tadi. Perspektif Islam berasal dari cara pandang (*worldview*) ajaran Islam yang khas dan berbeda dari cara pandang Barat. Namun dengan berbagai banyaknya isu-isu dan dinamika yang terjadi, Islam dalam hubungan internasional sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat negatif dan berangkat dari itu juga munculnya suatu perspektif yang mengantarkan pada sentimen yang buruk dalam penggambaran Islam.

Sentimen yang ada sering disebut sebagai Islamophobia yang merujuk pada rasa takut yang tidak memiliki referensi, tidak masuk akal atas sebuah objek, tingkah laku, atau pada peristiwa tertentu yang memotivasi individu untuk menghindari atau takut pada situasi tersebut. Begitu banyak yang mengartikan mengenai Islamophobia, namun pada dasarnya unsur tersebut lebih mengarah pada adanya upaya menggiring opini dan juga upaya menghilangkan citra Islam yang sesungguhnya. Berangkat dari segala macam persoalan yang ada terlebih dalam masalah Islamophobia dan isu mengenai kerukunan beragama, berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara dilingkungan internasional sebagai langkah antisipasi terhadap anggapan yang buruk serta perpecahan antar umat beragama mulai dari berbagai kerjasama dan upaya melalui dialog antar agama.



**Gambar 2.1**  
**Model Kerangka Pemikiran**